

**PENGARUH PENGALAMAN DAN AKUNTABILITAS TERHADAP
KUALITAS AUDIT INTERNAL
INSPEKTORAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Oleh:

Andi Yahya Sembiring

Rustiana

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
JALAN BABARSARI 43-44, YOGYAKARTA**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh pengalaman dan akuntabilitas terhadap kualitas audit internal Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi sampai dengan tingkat Pusat.

Variabel Independen dalam penelitian ini adalah pengalaman dan akuntabilitas. Untuk variabel dependen dalam penelitian ini adalah kualitas audit internal. Data dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner secara langsung kepada seluruh auditor Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta.

Model analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah regresi linier sederhana, analisis ini didasarkan pada data dari 40 responden yang penelitiannya melalui kuesioner.

Hasil penelitian ini menunjukkan pengalaman dan akuntabilitas secara parsial berpengaruh positif terhadap kualitas audit internal Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta. Masing-masing memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas audit internal.

Kata Kunci: Pengalaman, Akuntabilitas dan Kualitas Audit Internal.

Latar Belakang Masalah

Dalam berbagai diskusi ilmiah, korupsi diakui sebagai musuh bersama bagi masyarakat Indonesia, karena dampak nyata kegiatan korupsi bukan hanya menimbulkan *high cost economy* yang dapat menyebabkan penurunan daya saing terhadap pasar global, tetapi juga merugikan negara serta dalam jangka panjang dapat menimbulkan kerusakan moral masyarakat Indonesia. Namun kenyataan menunjukkan bahwa korupsi sulit untuk diberantas apalagi dalam waktu yang singkat. disebabkan telah mengakarnya praktik korupsi, khususnya dalam penyelenggaraan Pemerintahan. Hal tersebut terbukti dengan adanya kasus yang terjadi beberapa waktu lalu di BPK Perwakilan Jawa Barat (10/11/2010 <http://infokorupsi.com>), terdapat kasus penyuapan yang melibatkan oknum pejabat Pemerintah Kota Bekasi, salah satu diantaranya kepala Inspektorat Pemerintah Kota Bekasi.

Aparat Pengawas Intern Pemerintah adalah unit organisasi dilingkungan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kementerian Negara, Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan dalam lingkungan kewenangannya. Sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat Provinsi bertugas untuk menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh kepala daerah telah dipatuhi dan berjalan sesuai dengan rencana, menentukan baik atau tidak pemeliharaan kekayaan daerah serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh unit dan satuan kerja pemerintah daerah (SKPD).

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tanggal 31 maret 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah (SA-APIP). Tercantum dalam diktum kedua menegaskan bahwa standar audit APIP wajib dipergunakan sebagai acuan bagi seluruh APIP dalam melaksanakan audit sesuai dengan mandat audit masing-masing, dalam rangka peningkatan kualitas auditor pada saat melakukan pemeriksaan. Untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi auditor, direntukan keandalan, kecermatan, ketepatan waktu dan mutu jasa serta pelayanan yang diberikan oleh profesi auditor.

Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor PER/05/M.PAN/03/2008, pengukuran kualitas audit atas laporan audit yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), wajib menggunakan Standar audit Aparat Intern Pengawas Pemerintah (SA-APIP). Audit yang berkualitas adalah audit yang dapat ditindaklanjuti oleh *auditee*. Kualitas ini harus dibangun sejak awal pelaksanaan audit hingga pelaporan dan pemberian rekomendasi. APIP dalam menjalankan tugasnya harus memegang prinsip-prinsip profesi, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang kode etik APIP.

Audit yang dilakukan oleh auditor pemerintah pada umumnya terdiri atas audit kinerja dan audit investigatif. Audit kinerja adalah audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas audit aspek ekonomi, efisiensi dan audit aspek efektifitas. Sedangkan audit investigatif adalah proses mencari, menemukan dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya.

Persyaratan yang harus dimiliki oleh seorang auditor seperti dinyatakan dalam Peraturan Menpan nomor PER/05/M.PAN/03/2008 adalah keahlian, namun seringkali definisi keahlian dalam bidang audit diukur dengan pengalaman (Mayasari, 2003). Menurut Djaddang dan Agung (2002) dalam Rahmawati dan Winarna (2002), auditor ketika mengaudit harus memiliki keahlian yang meliputi dua unsur yaitu pengetahuan dan pengalaman. Karena beberapa alasan tersebut pengalaman telah dipandang sebagai suatu faktor dalam memprediksi kinerja auditor yaitu kualitas auditnya.

Bagi seorang auditor, pengalaman merupakan atribut yang penting yang harus dimiliki. Pengalaman auditor yang dimaksud adalah pengalaman auditor dalam melakukan audit, baik dari segi lamanya waktu maupun banyaknya penugasan yang pernah dilakukan. Dalam penelitian Nataline (2007), menunjukan bahwa ada pengaruh positif pengalaman terhadap kualitas audit. Auditor yang tidak berpengalaman akan melakukan kontribusi kesalahan lebih besar dibandingkan dengan auditor yang berpengalaman (Hardiningsih, 2002) dalam (Shinta, 2010).

Selain pengalaman, kualitas audit dapat dipengaruhi oleh rasa kebertanggungjawaban (akuntabilitas) yang dimiliki auditor dalam menyelesaikan pekerjaan audit. Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi, kegiatan audit sangat esensial. Proses audit melalui prosedur yang berjenjang, dan setiap tahapan akan melibatkan *judgment* auditor atas suatu kejadian atau fakta dilapangan. Hasil audit akan memberikan umpan balik bagi pihak yang terkait dengan organisasi.

Mardisar dan Sari (2007) mengatakan bahwa kualitas hasil pekerjaan auditor dapat dipengaruhi oleh rasa kebertanggungjawaban (akuntabilitas) yang dimiliki auditor dalam menyelesaikan pekerjaan audit, sedangkan penelitian yang dilakukan Messier dan Quilliam (1992) mengungkapkan bahwa akuntabilitas yang dimiliki auditor dapat meningkatkan proses kognitif auditor dalam mengambil keputusan. Berdasarkan penelitian-penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat akuntabilitas individu dalam melakukan sebuah pekerjaan menentukan bagaimana sebuah informasi diproses. Hasil dari informasi yang diproses tersebut, akan mempengaruhi respon, keputusan ataupun tindakan yang akan diambil. Oleh karena itu akuntabilitas merupakan hal yang sangat penting yang harus dimiliki oleh seorang auditor dalam melaksanakan pekerjaanya.

Peneliti tertarik melakukan penelitian di lingkungan pemerintahan yaitu auditor yang bekerja di Inspektorat DIY didasari oleh opini masyarakat tentang rendahnya kualitas audit yang dilakukan oleh auditor khususnya auditor disektor pemerintah seperti yang pernah diungkapkan oleh Agus Martowadojo sewaktu masih menjabat menteri keuangan. Beliau menilai kualitas audit yang dilakukan auditor pemerintah kurang baik.

Penelitian ini mengadopsi variabel penelitian yang dilakukan Diani dan Ria (2007) serta Susanti (2011). yang menjadi pertimbangan penulis selaku peneliti untuk melakukan penelitian topik serupa walaupun penelitian sejenis telah banyak dilakukan sebelumnya pada auditor yang bekerja pada Auditor di KAP “Big Four” di Indonesia serta Auditor Eksternal Pemerintah di lingkup wilayah BPK DIY seperti yang dilakukan oleh Susanti (2011).

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Apakah pengalaman berpengaruh terhadap kualitas audit internal?
2. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas audit internal?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai:

1. Untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh pengalaman kerja terhadap kualitas audit internal.
2. Untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas audit internal.

Pengertian Audit

- Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008, audit adalah: “Proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah”.
- Menurut Malan (1984) pengertian audit adalah: “Suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif mengenai asersi atas tindakan dan kejadian ekonomi, kesesuaian dengan standar yang telah ditetapkan dan kemudian mengkomunikasikannya kepada pihak pemakai”.
- Menurut Leo Hebert (2005) pengertian *auditing* adalah: “Suatu proses kegiatan selain bertujuan untuk mendeteksi kecurangan atau penyelewengan dan memberikan simpulan atas kewajaran penyajian akuntabilitas, juga menjamin ketaatan terhadap

hukum, kebijaksanaan dan peraturan melalui pengujian apakah aktivitas organisasi dan program dikelola secara ekonomis, efisien dan efektif”.

Proses Audit Sektor Publik

Langkah-langkah dalam proses audit (Indra Bastian, et.al) adalah:

Perencanaan Audit Sektor Publik

Pada audit sektor publik, perencanaan merupakan tahap yang vital dalam audit meliputi tahap-tahap yakni (1) pemahaman atas sistem akuntansi keuangan sektor publik, (2) penentuan tujuan dan lingkup audit yang ditetapkan sesuai dengan mandat dan wewenang lembaga audit dan pengawas, (3) penilaian resiko atas resiko pengendalian, resiko bawaan, resiko deteksi, (4) penyusunan rencana audit, (5) penyusunan program audit.

Pelaksanaan Audit Sektor Publik

Dalam pelaksanaan audit sektor publik, terdapat definisi struktur pengendalian internal. Ada 3 golongan tujuan yang terdiri atas (1) keandalan laporan keuangan, (2) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku dan (3) efektivitas dan efisiensi operasi. Pada jenis pengendalian internal juga meliputi atas organisasi, pemisahan tugas, fisik, persetujuan dan otorisasi, akuntansi, personil, supervisi dan manajemen. Unsur-unsur dari struktur pengendalian internal meliputi atas lima unsur pokok yakni: (1) lingkungan pengendalian, (2) penaksiran resiko, (3) informasi dan komunikasi, (4) aktivitas pengendalian, dan (5) pemantauan. Dalam pengendalian internal perlu pemahaman atas struktur pengendalian internal.

Ada 3 jenis prosedur audit yakni: (1) mewawancarai personel dinas/instansi yang berkaitan dengan unsur struktur pengendalian, (2) melakukan inspeksi terhadap dokumen dan catatan dan (3) melakukan pengamatan atas kegiatan dinas/instansi. Hal yang terpenting adalah informasi yang dikumpulkan oleh auditor yakni: (1) rancangan dari berbagai kebijakan dan prosedur, (2) apakah kebijakan dan prosedur benar-benar dilaksanakan. Pada perancangan pengujian substantif, auditor harus menghimpun bukti yang cukup.

Perancangan dimaksud meliputi: (1) sifat pengujian, (2) waktu pengujian, dan (3) luas pengujian. Adapun prosedur untuk melaksanakan pengujian substantif terdiri atas 8 (delapan) prosedur yakni: (1) pengajuan pertanyaan, (2) pengamatan atau observasi, (3) inspeksi atas dokumen dan catatan, (4) perhitungan kembali, (5) konfirmasi, (6) analisis, (7) pengusutan dan (8) penelusuran.

Begitu juga dengan sifat atau jenis substantif, dimana ada tiga jenis pengujian substantif yang digunakan yakni: (1) pengujian rinci atau rincian saldo, (2) pengujian rinci atau rincian transaksi dan (3) prosedur analitis. Dalam penentuan saat pelaksanaan pengujian substantif dilakukan jika resiko rendah maka pengujian substantif lebih baik dilaksanakan pada atau mendekati tanggal neraca. Adapun juga mengenai luas pengujian substantif yakni semakin rendah tingkat resiko yang dapat diterima, maka semakin banyak bukti yang diperlukan.

Pelaporan Audit Sektor Publik

Pada tahapan akhir dari audit sektor publik yakni pelaporan, pada pelaporan ini, perlu diperhatikan beberapa item diantaranya yakni (1) tinjauan kertas kerja dan kesimpulan. Kertas kerja merupakan media penghubung antara catatan klien dengan laporan audit. Kepemilikan kertas kerja sepenuhnya ada ditangan auditor. (2) Kertas kerja dan standar pelaporan. Kertas kerja berhubungan erat dengan standar pelaporan dimana diperlukan untuk berjaga-jaga terhadap tuntutan pemakai laporan keuangan dan sanksi lembaga profesi. (3) Isi kertas kerja.

Kertas kerja merupakan bukti dilaksanakannya standar audit dan program audit yang telah ditetapkan. Isi dokumentasi dari kertas kerja memperlihatkan pemeriksaan telah direncanakan dan disupervisi dengan baik, pemahaman yang memadai atas struktur

pengendalian internal yang telah diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat dan lingkup pengujian yang telah dilakukan, bukti audit yang telah diperoleh, prosedur yang telah diterapkan dan pengujian yang telah dilaksanakan sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.

Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat kertas kerja yakni (1) lengkap, (2) teliti, (3) ringkas, (4) jelas dan (5) rapi. Pembuatan kertas kerja harus mempunyai maksud dan tujuan yang jelas. Auditor dan asistennya sering memperoleh keterangan lisan dari klien dan karyawan klien. Pertanyaan yang belum terjawab jangan ditinggalkan tidak terjawab begitu saja. Pembuatan kertas kerja harus menulis semua persoalan relevan yang dihadapi selama pemeriksaan. Memiliki kriteria kertas kerja yang baik.

Jenis kertas kerja terdiri dari program audit, neraca saldo, ringkasan jurnal penyesuaian dan jurnal pengklasifikasian kembali, daftar pendukung, daftar utama, memorandum audit serta dokumentasi informasi pendukung. Disusunan kertas kerja harus disajikan dalam susunan yang sistematis yakni terdiri dari: (a) draf laporan audit, (b) laporan keuangan independen, (c) ringkasan informasi yang diperoleh, (d) program audit, (e) laporan keuangan atas neraca lajur yang dibuat, (f) ringkasan jurnal penyesuaian, (g) neraca saldo, (h) daftar utama dan (i) daftar pendukung.

Auditor harus menelaah kertas kerja yang dibuat oleh staff maupun asistennya. Kertas kerja adalah milik kantor akuntan publik dan bukan milik pribadi auditor maupun klien. Jenis pengarsipan kertas kerja terdiri dari arsip permanen dan arsip sementara/kini. Memiliki hubungan antar kertas kerja audit. Melaporkan Berbagai macam temuan. Standar audit pemerintah membagi audit menjadi dua kelompok yaitu audit keuangan dan audit kinerja.

Jenis-jenis laporan audit terdiri dari: (1) laporan audit tahunan, (2) laporan audit triwulan, (3) laporan kemajuan kinerja bulanan, (4) laporan survei pendahuluan, (5) laporan audit interim. Dalam pelaporan ini juga tergambar dengan jelas bentuk temuan. Bentuk temuan merupakan kertas kerja audit yang paling kritis, jika terdapat hal penting dan kritis auditor harus mempunyai waktu untuk mendokumentasikan dengan hati-hati.

Auditor Internal Pemerintah

Auditor internal dipegang oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten atau Kota.

- Menurut Permenpan No. PER/05/M.PAN/03/2008 menyatakan bahwa: “Auditor intern adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai jabatan fungsional auditor dan/atau pihak lain yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas nama APIP.
- Menurut Arens-loebbecke (2005) mengatakan “Internal auditor adalah seseorang yang bekerja sebagai karyawan suatu organisasi untuk melakukan audit bagi kepentingan manajemen”
- Menurut Mulyadi, terdapat tiga tipe yaitu auditor independen, auditor intern dan auditor pemerintah. Auditor yang bekerja pada bidang pemerintahan adalah auditor pemerintah. Auditor pemerintah dapat didefinisikan sebagai auditor profesional yang bekerja di instansi pemerintah yang tugas pokoknya melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan yang disajikan oleh unit-unit organisasi atau entitas pemerintahan atau pertanggungjawaban yang ditujukan kepada pemerintah. Meskipun terdapat banyak auditor yang bekerja di instansi pemerintah, namun umumnya yang disebut auditor pemerintah adalah auditor yang bekerja di BPKP, BPK, Inspektorat dan instansi pajak.

Auditor internal merupakan seorang auditor yang bertugas menilai fungsi organisasi. Meriviu tindakan organisasi, selain itu melakukan suatu pemeriksaan yang mengukur, mengevaluasi dan melaporkan efektivitas pengendalian internal, keuangan dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya organisasi. Penelitian ini fokus kepada auditor internal pemerintahan, yaitu auditor Inspektorat. Inspektorat merupakan lembaga pengawasan di lingkungan pemerintah daerah, baik ditingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota. Inspektorat memainkan peran sangat penting dan signifikan dalam kemajuan dan keberhasilan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah agar dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan yang dilakukan oleh Inspektorat adalah kegiatan audit, yang meliputi:

1. Pemeriksaan secara berkala dan komprehensif terhadap kelembagaan pegawai daerah, keuangan daerah, barang daerah dan urusan pemerintah,
2. Pemeriksaan dana desentralisasi,
3. Pemeriksaan dana dekonstralisasi,
4. Pemeriksaan tugas pembantuan,
5. Pemeriksaan terhadap kebijakan pinjaman dan hibah luar negeri.

Selain pemeriksaan (audit), auditor Inspektorat dapat juga melakukan pemeriksaan tertentu dan audit terhadap laporan mengenai indikasi kemungkinan terjadinya tindakan penyimpangan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Auditor Inspektorat bertanggungjawab terhadap Gubernur, maka peran Auditor Inspektorat sangat penting serta hasil audit yang dihasilkan auditor inspektorat cukup disoroti oleh masyarakat.

Auditor Inspektorat melakukan proses audit terhadap pemerintah daerah, kemudian dari hasil tersebut diberikan pada Gubernur. Pihak BPK melakukan pemeriksaan atas laporan hasil audit yang telah dibuat oleh auditor inspektorat, agar BPK dapat mengeluarkan opini terhadap laporan hasil audit yang telah dibuat tersebut. Maka, hasil audit auditor inspektorat menjadi '*second opinion*' bagi BPK dalam melakukan proses audit.

Tugas dan Fungsi Auditor Inspektorat

Dalam peraturan daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, pada pasal 4 dijelaskan bahwa Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota.

Selanjutnya pada pasal 5, untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Inspektorat mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan program pengawasan
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan
- c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan
- d. Pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah daerah,
- e. Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan pemerintah di daerah Kabupaten/Kota
- f. Penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan.

Susunan Organisasi di Inspektorat terdapat pada pasal 6, yang isinya:

(1) Unsur organisasi Inspektorat terdiri dari:

- a. Pimpinan: Inspektur
- b. Pembantu Pimpinan: Sekretariat yang terdiri dari Subbagian.

- c. Pelaksana :
 - Inspektorat Pembantu
 - Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri dari:
 - a. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Subbagian Program dan Keuangan.
 - 2. Subbagian Umum.
 - 3. Subbagian Data, Teknologi Informasi, Monitoring dan Evaluasi.
 - b. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan,
 - c. Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian,
 - d. Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat,
 - e. Inspektur Pembantu Bidang Sarana dan Prasarana,
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (SA-APIP)

Merupakan revisi atas Standar Audit Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah yang disusun oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tahun 1996. Dalam undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, diatur tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab keuangan Negara yang dilakukan oleh dan atau atas nama Badan Pemeriksaan Keuangan (pasal 1 butir (3)). Karena APIP adalah auditor intern dalam lembaga eksekutif dan dibentuk untuk membantu pimpinan dilingkungan lembaga eksekutif, baik di tingkat Presiden, Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) sampai ke tingkat pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Landasan Hukum

Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (SA-APIP) diterbitkan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam peraturan Menpan Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tanggal 31 maret 2008

Pengertian Standar Audit APIP

Standar audit APIP adalah kriteria atau ukuran mutu minimal untuk melakukan kegiatan audit yang wajib dipedomani oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Tujuan dan Fungsi Standar Audit APIP

Tujuan standar audit APIP adalah:

- a. Menetapkan prinsip-prinsip dasar untuk merepresentasikan praktik-praktik audit yang seharusnya.
- b. Menyediakan kerangka kerja pelaksana dan peningkatan kegiatan audit intern yang memiliki nilai tambah.
- c. Menetapkan dasar-dasar pengukuran kinerja audit.
- d. Mempercepat perbaikan kegiatan operasi dan proses organisasi.
- e. Menilai, mengarahkan dan mendorong auditor untuk mencapai tujuan audit.
- f. Menjadi pedoman dalam pekerjaan audit.
- g. Menjadi dasar penilaian keberhasilan pekerjaan audit.

Standar audit berfungsi sebagai ukuran mutu minimal bagi para auditor APIP dalam:

- a. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dapat merepresentasikan praktik-praktik audit yang seharusnya menyediakan kerangka kerja pelaksanaan dan peningkatan kegiatan audit yang memiliki nilai tambah serta menetapkan dasar-dasar pengukuran kinerja audit.
- b. Pelaksanaan koordinasi audit oleh APIP.
- c. Pelaksanaan perencanaan audit oleh APIP, dan

- d. Penilaian efektivitas tindak lanjut hasil pengawasan dan konsistensi penyajian laporan hasil audit.
- e. Ruang lingkup kegiatan audit yang diatur dalam standar audit meliputi audit kinerja dan audit investigatif, sedangkan audit atas laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan wajib menggunakan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

Tabel 2.2
Standar Audit



Menurut Indra Bastian (2006:210) “standar audit memuat persyaratan profesional auditor, mutu pelaksanaan audit dan persyaratan laporan audit yang profesional dan bermutu”. Kualitas audit dapat ditentukan melalui kesesuaian dengan standar yang berlaku, salah satunya standar audit APIP, karena standar ini adalah kriteria atau ukuran untuk melakukan kegiatan audit yang diwajibkan menjadi pedoman oleh APIP (BPKP, 2009 : 36).

Kepercayaan masyarakat terhadap mutu jasa audit pemerintah khususnya harus dijaga, oleh karena itu auditor diharapkan dapat melaksanakan program jaminan kualitas audit. Standar audit APIP yang dinyatakan oleh PER/05/M.PAN/03/2008 tanggal 31 maret 2008 terdiri dari standar umum, standar pelaksanaan audit serta standar pelaporan audit.

Standar Umum menyatakan:

- Visi, misi, tujuan, kewenangan dan tanggung jawab APIP harus dinyatakan secara tertulis, disetujui dan ditandatangani oleh pimpinan tertinggi organisasi.
- Pimpinan APIP bertanggung jawab kepada pimpinan tertinggi organisasi agar tanggung jawab pelaksanaan audit dapat terpenuhi.
- Auditor harus memiliki sikap yang netral dan tidak bias serta menghindari konflik kepentingan dalam merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pekerjaan yang dilakukan.
- Jika independensi atau obyektifitas terganggu baik secara faktual maupun penampilan, maka gangguan tersebut harus dilaporkan kepada pimpinan APIP.
- Auditor APIP harus mempunyai tingkat pendidikan formal minimal Strata satu (S-1) atau yang setara.
- Kompetensi teknis yang harus dimiliki oleh auditor adalah auditing, akuntansi, administrasi pemerintahan dan komunikasi.
- Auditor harus mempunyai sertifikasi jabatan fungsional auditor (JFA) dan mengikuti pendidikan dan pelatihan profesional berkelanjutan (*continuing professional education*).
- APIP dapat menggunakan tenaga ahli apabila APIP tidak mempunyai keahlian yang diharapkan untuk melaksanakan penugasan.

- Auditor harus menggunakan keahlian profesional dengan cermat dan seksama (*due professional care*) dengan secara hati-hati (*prudent*) dalam setiap penugasan.
- Auditor harus mematuhi kode etik yang ditetapkan.

Standar Pelaksanaan audit menyatakan :

- Dalam setiap penugasan audit, auditor harus menyusun rencana kerja yang terdiri dari penetapan sasaran, ruang lingkup, metodologi, dan alokasi sumberdaya.
- Pada setiap tahap audit, pekerjaan auditor harus disupervisi secara memadai untuk memastikan tercapainya sasaran, terjaminnya kualitas dan meningkatkan kemampuan auditor.
- Auditor harus mengumpulkan dan menguji bukti untuk mendukung kesimpulan dan temua audit
- Auditor harus mengembangkan temuan yang diperoleh selama pelaksanaan audit.
- Auditor harus menyiapkan dan menata-usahakan dokumen audit kinerja dalam bentuk kertas kerja audit. Dokumen audit harus disimpan secara tertib dan sistematis agar dapat secara efektif diambil kembali, dirujuk dan dianalisis.

Standar Pelaporan menyatakan:

- Auditor harus membuat laporan hasil audit sesuai dengan penugasannya yang disusun dalam format yang sesuai, segera setelah selesai melakukan audit.
- Laporan hasil audit harus dibuat secara tertulis dan segera, yaitu pada kesempatan pertama setelah berakhirnya pelaksanaan audit.
- Laporan hasil audit harus dibuat dalam bentuk dan isi yang dapat dimengerti oleh auditi dan pihak lain yang terkait.
- Auditor harus melaporkan adanya kelemahan atas sistem pengendalian intern auditi.
- Auditor harus melaporkan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kecurangan dan ketidakpatuhan.
- Laporan hasil audit harus tepat waktu, lengkap, akurat, obyektif, meyakinkan serta jelas dan ringkas mungkin.
- Auditor harus meminta tanggapan atas pendapat terhadap kesimpulan, temuan, rekomendasi termasuk tindakan perbaikan yang direncanakan oleh auditi secara tertulis dari pejabat auditi yang bertanggungjawab.
- Laporan hasil audit diserahkan kepada pimpinan organisasi, auditi, dan pihak lain yang diberi wewenang untuk menerima laporan hasil audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengaruh Pengalaman Terhadap Kualitas Audit Internal

Pengalaman merupakan suatu proses pembelajaran dan pertambahan perkembangan potensi bertingkah laku baik dari pendidikan formal maupun non formal atau bisa diartikan sebagai suatu proses yang membawa seseorang kepada suatu pola tingkah laku yang lebih tinggi. Suatu pembelajaran juga mencakup perubahan yang relatif tepat dari perilaku yang diakibatkan pengalaman, pemahaman dan praktik (Knoers & Haditono, 1999 dalam Asih, 2006:12).

Pengalaman kerja dapat memperdalam dan memperluas kemampuan kerja. Semakin sering seseorang melakukan pekerjaan yang sama, semakin terampil dan semakin cepat dia menyelesaikan pekerjaan tersebut. Semakin banyak macam pekerjaan yang dilakukan seseorang, pengalaman kerjanya semakin kaya dan luas, dan memungkinkan peningkatan kinerja (Simanjuntak, 2005:27).

Marinus dkk (1997) dalam Herliansyah dkk (2006) menyatakan bahwa secara spesifik pengalaman dapat diukur dengan rentang waktu yang telah digunakan terhadap suatu tugas

(*job*) atau pekerjaan. Hasil penelitian Herliansyah dkk (2006) menunjukkan bahwa pengalaman mengurangi dampak informasi tidak relevan terhadap judgment auditor.

Jadi dapat dikatakan bahwa seseorang jika melakukan pekerjaan yang sama secara terus menerus, maka akan menjadi lebih cepat dan lebih baik dalam menyelesaikannya. Hal ini dikarenakan dia telah benar-benar memahami teknik atau cara menyelesaikannya, serta telah banyak mengalami berbagai hambatan-hambatan atau kesalahan-kesalahan dalam pekerjaannya tersebut, sehingga dapat lebih cermat dan berhati-hati menyelesaikannya. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang kemukakan adalah:

H1: Pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap kualitas audit internal

Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kualitas Audit Internal

Tetlock (1984) dalam Diani dan Ria (2007) menjelaskan, Akuntabilitas merupakan bentuk dorongan psikis yang membuat seseorang bertanggung jawab semua tindakan dan keputusan yang diambil kepada lingkungannya.

Sedangkan dalam penelitian Mardisar. D dan R. Nelly Sari (2007), seseorang dengan akuntabilitas tinggi memiliki keyakinan yang lebih tinggi bahwa pekerjaan mereka akan diperiksa oleh supervisor/manajer/pimpinan dibandingkan dengan seseorang yang memiliki akuntabilitas rendah, dari hasil penelitian ini terbukti bahwa untuk subjek yang memiliki akuntabilitas tinggi, setiap mengambil tindakan lebih berdasarkan alasan-alasan yang rasional tidak hanya berdasarkan sesuatu itu mereka senangi atau tidak.

Dengan demikian dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk memberikan keterangan atau laporan terhadap tindakan yang telah dilakukan kepada pemberi mandat. Media pertanggungjawaban dalam konsep akuntabilitas tidak terbatas pada laporan pertanggungjawaban saja, tetapi mencakup juga praktik-praktik kemudahan pada pemberi mandat untuk mendapatkan informasi. Dengan demikian, akuntabilitas akan tumbuh subur pada lingkungan yang mengutamakan keterbukaan sebagai landasan pertanggungjawaban.

Akuntabilitas adalah bentuk dorongan psikis yang membuat seseorang bertanggung jawab semua tindakan dan keputusan yang diambil. Penelitian yang membuktikan adanya hubungan dan pengaruh akuntabilitas seseorang terhadap kualitas pekerjaan.. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang kemukakan adalah:

H2 : Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas audit internal

Populasi dan Sampel

Populasi adalah kelompok elemen yang lengkap, yang biasanya berupa orang, objek, transaksi atau kejadian dimana kita tertarik untuk mempelajarinya atau menjadikannya objek penelitian (Kuncoro, 2003:103), sedangkan sampel adalah suatu himpunan bagian dari unit populasi.

Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh petugas Inspektorat yang bertugas sebagai auditor pada Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki masa kerja minimal dua tahun dan yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional auditor (JFA). Lokasi tempat penelitian ini adalah kantor Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta yang beralamat di Jalan Cendana No 40, Yogyakarta.

Variabel Independen

Variabel Independen (bebas) merupakan variabel yang mempengaruhi variabel lain baik secara positif maupun negatif (Sekaran, 2006). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pengalaman dan akuntabilitas.

Pengalaman

Sukriah, dkk (2009) mengidentifikasikan *experience*/pengalaman, yaitu: pengalaman auditor dalam melakukan audit yang dilihat dari segi lainnya bekerja sebagai auditor dan banyaknya tugas pemeriksaan yang telah dilakukan. Pengalaman adalah keterampilan dan pengetahuan yang diperoleh seseorang setelah mengerjakan sesuatu hal.

Variabel pengalaman akan diukur dengan menggunakan indikator lamanya bekerja (kuesioner pertanyaan no 1 sampai no 3), frekuensi pekerjaan pemeriksaan yang telah dilakukan (kuesioner pertanyaan no 4 sampai no 7), seperti yang digunakan oleh Aji (2009) serta ditambah dengan satu indikator yang juga dapat memproksikan pengalaman seorang auditor yaitu banyaknya pelatihan yang telah diikutinya (kuesioner pertanyaan no 8), yang diambil dari aspek-aspek kompetensi yang dikembangkan Mansur (2007) yang telah direplikasi oleh Susanti (2011). Instrument variabel Pengalaman terdiri dari 6 item pertanyaan dengan menggunakan lima skala *likert*. “Sangat Tidak Setuju” mendapat nilai 1, “Tidak Setuju” mendapat nilai 2, “Ragu-ragu ” mendapat nilai 3, “Setuju” mendapat nilai 4, dan “Sangat Setuju” mendapat nilai 5.

Dalam penelitian ini peneliti mengutip kuesioner dari kuesioner penelitian yang dilakukan Diah Ayu susanti (2011) serta peneliti melakukan beberapa perbaikan redaksi atau kata-kata yang terdapat pada kuesioner lama agar lebih spesifik dan lebih konsisten sesuai indikator yang telah dijelaskan diatas yang dijadikan acuan pada penelitian ini.

Akuntabilitas

Secara umum artinya permintaan pertanggungjawaban atas pemenuhan tanggungjawab yang diserahkan kepada auditor. Akuntabilitas diukur menggunakan indikator pertanyaan yang dikembangkan oleh Kalbers dan Forgaty (1995), yang telah diterjemahkan dan dimodifikasi oleh Aji (2009 : 51-52) yang direplikasi pada penelitian Susanti (2011), yaitu meliputi 3 dimensi: tanggung jawab (kuesioner pertanyaan no 1 sampai no 3), ketepatan laporan (kuesioner pertanyaan no 4) serta informasi yang diberikan (kuesioner pertanyaan no 5 sampai no 7) dengan mengutip kuesioner dari kuesioner penelitian Diah Ayu Susanti (2011).

Instrument variabel akuntabilitas terdiri dari 7 item pertanyaan dengan menggunakan lima skala *itemized rating scale*, “Tidak Pernah” mendapat nilai 1, “Jarang” mendapat nilai 2, “Kadang-Kadang ” mendapat nilai 3, “Sering” mendapat nilai 4, dan “Selalu” mendapat nilai 5. Dalam penelitian ini Peneliti melakukan beberapa perbaikan redaksi atau kata-kata yang terdapat pada kuesioner lama agar lebih spesifik dan lebih konsisten sesuai indikator yang telah dijelaskan diatas yang dijadikan acuan pada penelitian ini.

Variabel Dependen

Kualitas Audit Internal

Audit yang dilakukan auditor dikatakan berkualitas, jika memenuhi standar audit dan pengendalian mutu. Menurut Pusdiklatwas BPKP, kualitas audit adalah probabilitas seorang auditor atau pemeriksa dapat menemukan dan melaporkan suatu penyelewengan yang terjadi pada suatu instansi atau pemerintah (baik pusat maupun daerah). Kualitas audit merupakan variabel dependen dalam penelitian ini.

Pengukuran kualitas audit internal dalam penelitian ini mengutip dari kuesioner berbagai sumber penelitian, seperti kuesioner pada penelitian yang dilakukan Haslinda Lubis (2009) kuesioner no 2, 4 dan 5, Bona Manuel Tarigan (2010) kuesioner no 1, M Taufiq Efendy (2010) kuesioner no 3 dan no 14, Sukriah dkk (2009) kuesioner no 6 s/d 8 dan 10 s/d 12 serta 17 s/d 19 , Febri Purnama Esya (2008) kuesioner no 9 dan no 16, Diah Ayu Susanti (2011) kuesioner no 13, Nugraha Agung Eka Putra (2012) kuesioner no 15 serta no 20, dan

Cindorahma (2010) kuesioner no 21, penulis mengutip kuesioner dari beberapa sumber penelitian.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan beberapa perbaikan redaksi atau kata-kata yang terdapat pada kuesioner terdahulu agar lebih spesifik dan lebih konsisten sesuai indikator yang dijadikan acuan pada penelitian ini yaitu standar audit disektor pemerintahan (PER/05/M.PAN/03/2008) yaitu dilihat dari kesesuaian pada pelaksanaan audit dan kesesuaian pelaporan audit dengan standar audit APIP.

Standar pelaksanaan audit mencakup kesesuaian kegiatan pelaksanaan audit dengan standar umum, standar pelaksanaan audit dan standar pelaporan audit. Instrument variabel kualitas terdiri 26 item pertanyaan dengan menggunakan lima skala *itemized rating scale*, “Tidak Pernah” mendapat nilai 1, “Jarang” mendapat nilai 2, “Kadang-Kadang” mendapat nilai 3, “Sering” mendapat nilai 4, dan “Selalu” mendapat nilai 5. Berikut penulis melampirkan beberapa kuesioner yang mengalami perbaikan dengan menyesuaikan dengan standar audit disektor pemerintahan (PER/05/M.PAN/03/2008).

Statistik deksriptif

Statistik deskriptif ini digunakan untuk memberikan gambaran mengenai demografi responden penelitian. Data demografi tersebut antara lain: jenis kelamin, lama menjadi auditor, umur responden, serta latar belakang pendidikan yang menunjang bidang keahlian. Alat analisis data ini disajikan dengan mengundang tabel distribusi frekuensi yang memaparkan kisaran teoritis, kisaran aktual, rata-rata dari standar deviasi.

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah (valid) atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. (Ghozali, 2006). Untuk mengetahui kevaliditasan data kuesioner dapat dilakukan dengan menggunakan uji analisis faktor. Dari hasil analisis faktor tersebut dapat diketahui nilai KMO (*Kaiser meyer oklin measure of sampling adequacy*). Suatu instrument dikatakan valid jika nilai KMO $\geq 0,5$ dan angka MSA $\geq 0,5$ maka kumpulan variabel tersebut dapat diproses lebih lanjut (Santoso dan Tjiptono)

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengetahui adanya tingkat keandalan alat ukur dalam penggunaannya atau dengan kata lain alat ukur tersebut memiliki hasil yang konsisten apabila digunakan berkali-kali. Besarnya koefisien alpha yang diperoleh menunjukkan koefisien reliabilitas instrumen. Reliabilitas instrument penelitian dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan koefisien *Cronbachs Alpha*. Jika nilai koefisien alpha lebih besar dari 0,6 maka disimpulkan bahwa instrument penelitian tersebut handal atau reliabel (Nunnaly dalam Ghozali, 2006). Uji reliabilitas akan diukur dengan menggunakan program komputer SPSS.

Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel dependen dan variabel independen keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2006). Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Teknik pengujian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *One-Sample Kolmogorov Sminorv test* (Uji K-S). Untuk Uji K-S yakni jika nilai hasil Uji K-S > dibandingkan taraf signifikansi 0,05 maka sebaran data tidak menyimpang dari kurva normalnya itu uji normalitas.

Uji Analisis Regresi Linier Sederhana

Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini digunakan uji regresi linier sederhana. Regresi linier sederhana didasarkan pada hubungan fungsional maupun kausal antar variabel independen yaitu pengalaman serta akuntabilitas dengan satu variabel dependen yaitu kualitas audit internal. Hasil perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan program SPSS versi 20 dapat dilihat pada perhitungan berikut:

Hipotesis 1

Berdasarkan analisis regresi linier sederhana dengan menggunakan program SPSS versi 20 dapat diketahui:

Tabel 4.9
Hasil Analisis Regresi Aspek Pengalaman

Variabel	<i>B</i>	t hitung	P/Sig	Keterangan
<i>Constanta</i>	2,803	6,153	0,00	Sig
Pengalaman	0,389	3,639	0,01	Sig

Sumber: hasil olahan peneliti dengan SPSS 20 (2013)

Berdasarkan perhitungan, persamaan garis regresi linier sederhananya adalah:

$$Y = 2,803 + 0,389 X1$$

Hipotesis 2

Berdasarkan analisis regresi linier sederhana dengan menggunakan program SPSS ver 20 dapat didapatkan

Tabel 4.10
Hasil Analisis Regresi Aspek Akuntabilitas

Variabel	<i>B</i>	t hitung	P/Sig	Keterangan
<i>Constanta</i>	2,971	6,888	0,00	Sig
Akuntabilitas	0,353	3,454	0,01	Sig

Sumber: hasil olahan peneliti dengan SPSS 20 (2013)

Berdasarkan perhitungan, persamaan garis regresi linier sederhana untuk aspek akuntabilitas adalah :

$$Y = 2,971 + 0,353 X2$$

Pembahasan Hipotesis Pertama

Hasil analisis regresi pada variabel pengalaman diperoleh nilai probabilitas (p) 0,01. Berdasarkan ketentuan analisis regresi dimana jika nilai probabilitas regresi $\leq 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Hasil analisis regresi pada variabel pengalaman diperoleh nilai probabilitas (p) $0,01 \leq 0,05$ dengan koefisien regresi 0,389. Jika penelitian ini menggunakan nilai probabilitas sebesar 1% atau 0,01, maka hasil penelitian menunjukkan $0,01 \leq 0,01$. Sehingga penelitian ini menunjukkan terdapat pengaruh pengalaman terhadap kualitas audit internal. Berdasarkan analisis regresi tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin berpengalaman seorang auditor maka kualitas audit internal yang dihasilkan semakin baik.

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sukriah dkk (2009) dengan hasil uji statistik $\beta = 0,178$, $\text{sig} = 0,018$ dan koefisien regresi $0,190$ dimana dari hasil penelitian Sukriah (2009) menunjukkan bahwa semakin banyak pengalaman kerja yang dimiliki seorang auditor maka semakin meningkatkan kualitas hasil audit yang dilakukan. Serta penelitian yang dilakukan Nataline (2007), menunjukkan bahwa ada pengaruh positif pengalaman kerja terhadap kualitas audit.

Pembahasan Hipotesis Kedua

Hasil analisis regresi pada variabel akuntabilitas diperoleh nilai probabilitas (p) berdasarkan ketentuan analisis regresi, jika probabilitas regresi $\leq 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Hasil analisis regresi pada variabel akuntabilitas diperoleh nilai probabilitas (p) $0,01 \leq 0,05$ dengan koefisien regresi $0,353$. Jika penelitian ini menggunakan nilai probabilitas sebesar 1% atau $0,01$, maka hasil penelitian menunjukkan $0,01 \leq 0,01$. Sehingga penelitian ini menunjukkan terdapat pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas audit internal. Berdasarkan analisis regresi tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin baik akuntabilitas yang dimiliki seorang auditor maka kualitas audit internal yang dihasilkan akan semakin baik.

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mardisar dan Sari (2007) dengan hasil uji statistik $\beta = 2,145$, $\text{sig} = 0,001$, yang menyatakan bahwa akuntabilitas secara parsial berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Penelitian Mardisar dan Sari (2007) menyatakan kualitas audit dapat dipengaruhi oleh akuntabilitas yang dimiliki auditor dalam menyelesaikan suatu pekerjaan audit. Dan hasil tersebut konsisten dengan hasil penelitian Tetclock dan Kim (1987) dalam Mardisar dan Sari (2007), yang secara umum mengungkapkan akuntabilitas dapat meningkatkan proses kognitif seorang auditor, respon yang diberikan dan keputusan-keputusan yang diambil.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan secara keseluruhan, dari penelitian mengenai pengalaman dan akuntabilitas terhadap kualitas audit internal Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta. Maka diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengalaman berpengaruh positif terhadap Kualitas audit internal
2. Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas audit internal

Keterbatasan

Penelitian ini mengandung keterbatasan sebagai berikut:

1. Keterbatasan dalam memperoleh responden. Peneliti telah berkomunikasi dengan beberapa kantor Inspektorat Kabupaten di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dikarena kesibukan auditor dan banyaknya tugas audit yang dilakukan, kantor Inspektorat Kabupaten menolak peneliti untuk melakukan penelitian di instansi tersebut. Akhirnya peneliti hanya dapat melakukan penyebaran kuesioner pada Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Karena peneliti dibatasi oleh waktu dan biaya penelitian maka penelitian ini hanya dilakukan pada Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat umum, perlu dilakukan penelitian yang lebih luas lagi.

Saran

Bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian sejenis, perlu diperhatikan cara menyebarkan kuesioner kepada responden. Agar jumlah responden yang berpartisipasi pada pengisian kuesioner penelitian jumlahnya lebih banyak, maka peneliti hendaknya memperhatikan waktu penyebaran kuesioner, disaat auditor tidak memiliki banyak penugasan audit. Serta peneliti selanjutnya diharapkan mampu menelusuri lebih lanjut mengenai variabel yang mempengaruhi kualitas audit internal disektor pemerintahan.

Bagi Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta, dapat memberikan pelatihan atau seminar-seminar yang berkaitan tentang audit internal, seperti audit disektor pemerintah maupun topik audit internal yang berkembang saat ini. Pelatihan dan seminar tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan auditor yang ada di Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta. Sehingga dapat dihasilkan suatu audit yang baik dan berkualitas.

Daftar Pustaka

- Alim, M. Nizarul. Trisni Hapsari dan Lilik Purwanti. 2007. *Jurnal*. Pengaruh Kompetensi Dan Independensi Terhadap Kualitas Audit Dengan Etika Auditor Sebagai Variabel Moderasi. SNA X. Makassar.
- Aji, P. S. (2009). "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Audit Ditinjau dari Persepsi Auditor atas Independensi, Pengalaman, dan Akuntabilitas". Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Soedirman. Purwokerto. (Tidak dipublikasikan).
- Arens, Alvin A., Randal J.E dan Mark S.B. 2004. *Auditing dan Pelayanan Verifikasi, Pendekatan Terpadu*. Jilid 1, Edisi Kesembilan. Penerbit PT.Indeks. Jakarta
- Asih, Dwi Ananing Tyas. 2006. *Jurnal*. Pengaruh Pengalaman Terhadap Peningkatan Keahlian Auditor Dalam Bidang Auditing. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Cindorahma. 2010. Audit Expectation Gap Antara Pengguna Laporan Keuangan Daerah Dengan Auditor Pemerintah (Studi Empiris di Daerah Istimewa Yogyakarta). Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- Esya, Febri Purnama. 2010. Pengaruh Kompetensi Auditor Dan Pemahaman Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Auditor Bea dan Cukai di Wilayah Jakarta. Tesis. Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
- Elfarini, Eunike Christina. 2007. *Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor terhadap kualitas Audit (studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik di Jawa Tengah)*. Skripsi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
- Ghozali, Imam. 2009. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*. Cetakan IV. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang
- Herliansyah, Yudhi, Meifida Ilyas. 2006. *Jurnal*. Pengaruh Pengalaman Auditor Terhadap Penggunaan Bukti Tidak Relevan Dalam Auditor Judgment. SNA IX. Padang
- HM, Jogyianto. 2007. *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman*, Yogyakarta: BPFE UGM.

- Icuk, R. B dan Elisha, M. 2010. *Jurnal*. Pengaruh Independensi, Pengalaman, *Due Professional Care* Dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Audit (Studi pada Auditor di KAP “Big Four” di Indonesia). SNA XIII Purwokerto
- Indra, Bastian. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Erlangga
- Lubis, Haslinda. 2008. Pengaruh Keahlian, Independensi, Kecermatan Profesional dan Kepatuhan Pada Kode Etik Terhadap Kualitas Auditor Pada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara. Tesis. Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
- Malan.Roland M; James R.Fountain.Jr; Donald S.Arrowsmith & Robert L.Lockridge II.1984. *Performance Auditing in Local Government*. Chicago,Illinois; Government Finance Officers Association.
- Mardisar. D dan R. Nelly Sari. 2007. *Pengaruh Akuntabilitas dan Pengetahuan Terhadap Kualitas Hasil Kerja Auditor*. Jurnal Simposium Nasional Akunatnsi X. Makassar.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mansur, Tubagus. 2007. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Audit Ditinjau dari Persepsi Auditor atas Pelatihan dan Keahlian, Independensi dan Penggunaan Kemahiran Profesional. Tesis Program Studi Magister Sains Akuntansi Universitas Gadjah Mada (Tidak Dipublikasikan).
- Mayangsari, S. (2003). “Pengaruh Keahlian Audit dan Independensi terhadap Pendapat Audit: Sebuah Kuasi eksperimen”. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*. (6)1, 1-22.
- Muh. Taufik Efendy, 2010. “*Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Motivasi Terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kota Gorontalo)*” Tesis Sains Akuntansi, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Nataline. 2007. *Pengaruh Batasan Waktu Audit, Pengetahuan Akuntansi dan Auditing, Bonus serta Pengalaman terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di Semarang*. Skripsi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang
- Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat pasal 4, 5 dan 6.
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Inspektorat
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah.
- Pusdiklatwas BPKP. 2005. *Kode Etik dan Standar Audit*. Edisi Keempat.
- Putra, Nugraha Agung Eka. 2012. Pengaruh Kompetensi, Tekanan Waktu, Pengalaman Kerja, Etika dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Rahmawati, Desi dan Jaka Winarna. 2002. Peran Pengajaran Auditing terhadap Pengurangan *Expectation Gap*: Dalam Isu Peran Auditor dan Aturan serta Larangan pada Kantor Akuntan Publik. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*. Vol. 7. No. 2.

- Rapina dan Friska, Hana. 2011. *Pengaruh Komitmen Organisasi dan Tindakan Supervisi Terhadap Kepuasan Kerja Auditor Junior*. (Jurnal Ilmiah Akuntansi Akurat Nomor 6 Tahun Kedua September–Desember 2011).
- Santoso, Singgih dan Tjiptono, Fandy. 2001. Riset Pemasaran: Konsep dan Aplikasi dengan SPSS. Penerbit PT Elex Media Komputindo
- Sekaran, Uma. 2006. Metodologi Penelitian Untuk Bisnis. Jakarta: Salemba Empat.
- Sukriah, Ika, Akram, Inapaty, B.a, 2009, Pengaruh Pengalaman Kerja, Independensi, Obyektivitas, Integritas dan Kompetensi terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan, SNA XII, Palembang.
- Suraida, Ida. 2005. Jurnal. Pengaruh Etika, Kompetensi, Pengalaman Audit dan Risiko Audit Terhadap Skeptisme Professional Auditor dan Ketepatan. *Terhadap Kepuasan Kerja Auditor Junior*. (Jurnal Ilmiah Akuntansi Akurat Nomor 06 Tahun kedua September – Desember 2011).
- Surnardi dan Pancawati Hardiningsih. 2002. "Pengaruh Pengalarnan terhadap Profesionalisme serta Pengaruh Profesionalisme terhadap Kinerja dan Kepuasan Kerja: Studi Kasus Auditor BPKP." *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*. Vol. 9, No.1, Hal. 1-25
- Susanti, Diah Ayu. 2010. Pengaruh Independensi, Pengalaman, Due Profesional care dan Akuntabilitas Terhadap kualitas Audit BPK Perwakilan DIY). Tesis. Magister Akuntansi, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Tarigan, Bona Manuel. 2010. Pengaruh Akuntabilitas, Kompetensi dan Independensi Pemeriksa Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan pada Inspektorat Kota Medan. Tesis. Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.